

### BAB 3

## KEBERHASILAN CMI DALAM MEDIASI KONFLIK INTERNAL DI ACEH

### 3.1 Sejarah asal mula konflik Aceh

Konflik yang terjadi di Aceh punya akar sejarah yang panjang. Akar konflik tersebut berkaitan erat dengan relasi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan sebagian rakyat Aceh. Sebab itu, masalah yang terjadi di Aceh terutama bersifat ekonomi-politik dan sosiologi-politik. Sejarah asal mula konflik Aceh ini terdiri dari dua masa :

#### 3.1.1. Periode Daud Beureuh

Dahulu, Tengku Daud Beure'uh turut mendukung kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Untuk itu, negosiasi antara ia dengan pemerintah pusat adalah otonomi politik dengan penyelenggaraan syariat Islam. Namun, setelah merdeka Aceh tidak diberikan otonomi tersebut dan malah diintegrasikan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Kekecewaan ini kemudian muncul dalam bentuk pembentukan tentara Darul Islam/Tentara Islam Indonesia di Aceh pada tahun 1953. Pemberontakan tersebut usai tanggal 26 Mei 1959 saat Aceh diberi status Daerah Istimewa dengan otonomi luas, utamanya dalam bidang adat, agama, dan pendidikan.<sup>25</sup>

Selain masalah kekecewaan pada pemerintah pusat, konflik di Aceh juga muncul akibat peminggiran identitas budaya masyarakat Aceh. Sebagai sebuah komunitas, Aceh telah punya konsep yang mapan tentang budaya mereka (terkait agama Islam) yang berkembang sejak masa kerajaan Samudera Pasai. Identifikasi cultural masyarakat Aceh yang dilekatkan pada agama Islam ini kemudian mendorong negosiasi politik antara pimpinan Aceh dengan pemerintah awal Indonesia untuk menyelenggarakan syariat Islam.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Nurhasim, Moch. Abdul Rahaman Patp, Fadjri Alihar, Lamijo. (2003) *Konflik Aceh, Analisis Atas Sebab-sebab Konflik, Aktor Konflik, Kepentingan dan Upaya Penyelesaian*.  
<http://katalog.pdii.lipi.go/index.php/searchkatalog/downloadDataById/4126/4127.pdf>.

<sup>26</sup> Basri, Seta (2009, Agustus 2), *Konflik-konflik Vertikal di Indonesia*,  
<http://setabasri01.blogspot.com/2009/08/konflik-konflik-vertikal-di-Indonesia.html>

### **3.1.2 Periode Hasan Tiro dan deklarasi Gerakan Aceh Merdeka**

Periode konflik Aceh yang berikutnya pada awalnya, merupakan gerakan bawah tanah yang terdiri dari sekelompok intelektual yang kecewa atas model pembangunan di Aceh. Kelompok kecil ini dipimpin oleh Hasan Tiro, mereka memproklamkan kemerdekaan di Aceh pada tanggal 4 Desember 1976 dan memproklamkan diri sebagai kelompok Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Aspirasi kelompok separatis GAM sebagian besar juga didasari latar belakang sejarah yang menyatakan bahwa Aceh tidak pernah ikut serta dalam peraturan zaman kolonial Belanda dan tidak pernah menjadi bagian bangsa Indonesia yang terbentuk pada 1945.

Gagasan-gagasan Hasan Tiro ini semakin memuncak setelah Pemerintah Orde Baru mengeksplorasi gas alam dan minyak bumi di Aceh Utara sejak awal 1970-an. GAM menuntut diskriminasi yang berlangsung pada rejim Soeharto. Aceh mengeluhkan masalah eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Penekanan pemerintah Orde Baru pada pertumbuhan ekonomi mendorong eksplotasi besar-besaran pabrik LNG Arun dan pupuk Iskandar Muda. Dengan eksploitasi tersebut, Indonesia mampu keluar selaku eksportir LNG terbesar dunia dan 90% hasil pupuk pabrik di Aceh ini digunakan untuk ekspor.

Pembangunan pabrik eksploitasi alam mendatangkan kaum pendatang ke Aceh, utamanya dari Jawa, di mana orang-orangnya lebih profesional ketimbang Aceh. Gerakan Aceh Merdeka memperoleh dukungan luas dari ketimpangan etnis yang terjadi ini. Masyarakat Aceh mulai menyadari hasil tambang (gas dan minyak) hasil bumi mereka lebih banyak yang dibawa ke Jakarta ketimbang dikembalikan ke Aceh.

Konflik ini terkait pula dengan kemarahan mereka atas penyelenggaraan pemerintahan di bawah orang-orang Jawa. Kelompok ini menuduh telah terjadi kolonialisasi Jawa atas masyarakat dan kekayaan Aceh.

Munculnya kelompok ini ditanggapi oleh Orde Baru dengan cara represif. Hasil dari konflik antara ribuan anggota GAM dan tentara Republik Indonesia yang berlarut-larut, membuat Orba mengirimkan ribuan tentara sebagai alat untuk menumpas pemberontakan separatis GAM. Penyerangan-penyerangan oleh GAM

dianggap oleh elit politik di Aceh dan Jakarta sebagai gangguan atas proses pembangunan yang sedang berjalan.

Pada tahun 1980 Di Tiro dan sejumlah pemimpin GAM pindah ke Swedia, tetapi konflik masih terus berlanjut. Suharto dalam masa pemerintahan Orde Baru kemudian menggelar operasi gabungan pada tahun 1989, yaitu operasi militer dan operasi bakti untuk menumpas GAM . Pendekatan militer ini di belakang hari kemudian terkenal dengan istilah Daerah Operasi Militer (DOM), padahal nama operasi militernya adalah Operasi Jaring Merah (OJM).

Pendekatan militer ini ditempuh dengan tujuan agar pembangunan tidak mengalami gangguan. Di masa Orba, tidak ada toleransi bagi kaum pemberontak, karena itu pendekatan integrasi tidak memungkinkan pada waktu itu. Pendekatan militer menyebabkan terjadinya kekerasan pada periode DOM 1989 – 1995 di Aceh. Pada masa ini banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.

Akibat kegagalan pendekatan dalam menangani separatisme tersebut, sumber-sumber dan sebab-sebab separatisme di Aceh justru semakin subur. Kelompok GAM di masa DOM melakukan eksodus keluar dan melakukan perjuangan dari luar Aceh, melalui Malaysia, Libya dan Jenewa. Pendekatan-pendekatan yang pernah ditempuh pemerintah selanjutnya untuk mengatasi persoalan separatisme di Aceh sebelum perjanjian Helsinki, umumnya tidak beranjak dari pola dan pendekatan lama, pendekatan militeristik yang cenderung mengedepankan cara-cara kekerasan dalam mewujudkan keamanan di Aceh.

**Tabel 3.1**  
**Fase Pertumbuhan GAM, Jumlah Personil dan Lokasi Penyebarannya.**<sup>27</sup>

<b>Fase Pertumbuhan</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Lokasi Penyebaran dan Perkiraan jumlah personil</b>
1976 - 1982	Periode kelahiran dan konsolidasi kekuatan yang ditandai oleh bentuk-bentuk propaganda GAM kepada masyarakat	Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur. Diperkirakan waktu itu jumlah personilnya tidak lebih dari 500 orang
1982 - 1989	Periode rekonsolidasi kekuatan yang ditandai oleh aksi-aksi kekerasan dan kekacauan (sasaran-nya adalah aparat keamanan (ABRI))	Terbatas di pegunungan dan perjuangan dilakukan melalui luar Aceh dari Libya, Swedia, Singapura dan Malaysia
1989 - 2003	Periode Pengembangan Sayap militer, konflik bersenjata, dan perjuangan diplomatik di luar negeri, terutama pada 2003	Khususnya pasca jatuhnya Soeharto GAM mengalami perluasan wilayah ke kabupaten-kabupaten lain hampir di 17 kabupaten dengan estimasi jumlah pasukan sekitar 5.000 – 15.000 pasukan

### 3.3. Konflik kekerasan pada masa GAM

Pada masa-masa perkembangan GAM ini, banyak sekali kekerasan yang terjadi, baik itu diakibatkan oleh GAM, baik dilakukan oleh tentara Indonesia.

<sup>27</sup> Nurhasim, Moch, (Juli 2008), *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka, Kajian Tentang Konsensus Normatif antara RI- GAM dalam Perundingan Helsinki*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta

Jenis-jenis kekerasan yang terjadi meliputi; pembakaran, penculikan, pembunuhan, penyisiran di desa-desa, ancaman, pemerasan, pembunuhan maupun penembakan.

Setelah kegagalan CoHA ditahun 2003, penembakan dengan senjata api sering terjadi. Segera setelah tsunami, jumlah penembakan oleh senjata api drastis berkurang bahkan hampir tidak ada. Pada January 2005, hanya ada satu kasus di Aceh Timur. Namun pada masa negosiasi, menjadi tidak ada lagi karena permintaan dari mediator untuk menghentikan segala serangan satu sama lain selama proses mediasi.

Di Aceh Selatan, TNI merelokasi 5 desa, yang berjumlah sekitar 7.000 penduduk ke barak di kota kabupaten Tapak Tuan.

Kasus penculikan tidak hanya dilakukan oleh pasukan bersenjata saja, tapi juga sebagian besar oleh GAM. Penculikan oleh GAM dilakukan untuk meminta uang tebusan, dan hasil tebusan yang didapat akan dipakai untuk membiayai kegiatan mereka. Biasanya yang menjadi target adalah pegawai pemerintah, termasuk guru-guru, juga menjadi target. Alasannya adalah karena biasanya orang-orang tersebut lebih kaya dan bisa memenuhi uang tebusan. Masyarakat desa umumnya tidak menjadi target. Biasanya, pemimpin masyarakat bertindak dalam negosiasi kedua belah pihak dalam penculikan. Pemimpin masyarakat tersebut bisa Kepala Desa, dan juga Kepala Mukim (*read*: mukim adalah bentuk terkecil dari desa, satu desa terdiri dari beberapa mukim). Proses negosiasi dalam penculikan ini biasanya tidak mudah.

Penyisiran biasanya dilakukan oleh tentara Indonesia ataupun polisi di desa-desa yang dianggap menjadi markas GAM. Desa-desa yang akan disisir biasanya diberi label 'hitam'. Kasus pemerasan dilakukan di seluruh daerah Aceh. Target umum biasanya adalah transportasi umum atau yang berhubungan dengan perdagangan. Kendaraan pribadi, juga truk bantuan tsunami.

Tingkat keamanan di Aceh pada masa konflik bisa digambarkan dalam tabel<sup>28</sup> sebagai berikut :

<b>Kabupaten</b>	<b>Tidak Aman</b>
Gayo Lues	54%
Lhokseumawe	50%

<sup>28</sup> Barron, Patrick, Samuel Clark, Muslahuddin Daud. (2005, Agustus 23). *Conflict and Recovery in Aceh*.

Aceh Tenggara	50%
Aceh Selatan	38%
Aceh Tamiang	29%
Bireuen	28%
Aceh Timur	23%
Aceh Utara	11%

**Tabel 3.2 : Persepsi Tingkat Keamanan**

### **3.4 Evaluasi penanganan konflik di Indonesia**

Penanganan konflik di Indonesia sering mengalami kegagalan, hal ini disebabkan oleh :

#### **3.4.1. Adanya Perbedaan Fokus dan Penanganan yang parsial**

Perbedaan fokus yang dimaksud adalah penanganan konflik yang dilakukan hanya untuk mencapai target dan sasaran dari masing-masing pihak terkait tanpa mempertimbangkan kesinambungan (*sustainability*) dan tidak memiliki orientasi jangka panjang. Adanya perbedaan fokus menyebabkan penanganan menjadi tidak terpadu atau dilakukan secara terpisah-pisah (parsial) tanpa melalui mekanisme koordinasi yang jelas diantara pihak-pihak yang terkait.

#### **3.4.2. Formal dan elitis**

Penanganan konflik dirasakan belum sepenuhnya memanfaatkan cara-cara penyelesaian masalah yang telah lama ada dikalangan masyarakat. Penanganan masih dilakukan secara formal yang ditandai oleh dominannya peran pemerintah. Pelibatan masyarakat terbatas pada kalangan-kalangan tertentu atau belum menjangkau ke lapisan masyarakat di tingkat “akar rumput (*grassroot*)”.

#### **3.4.3. Tidak konsistennya pendekatan dan strategi yang diterapkan**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penanganan konflik yang selama ini dilakukan masih relatif terfokus pada bidang penanganan dari masing-masing lembaga/stakeholder yang terkait dan belum sepenuhnya diterpadukan penanganannya dalam suatu rencana aksi penanganan konflik yang sifatnya lintas sektoral ataupun lintas pelaku.

#### **3.4.4 Kurang Berdayaguna dan Berhasilgunanya Sistem Penyampaian (*Delivery System*) dan Penetapan Sasaran (*Targeting*)**

Kurang berdayaguna dan berhasilgunanya sistem penyampaian (*delivery system*) yang dimaksud adalah belum tersedianya sistem penyampaian yang cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan di daerah konflik. Kenyataannya menunjukkan bahwa sistem penyampaian yang ada belum mampu mengatasi cepatnya perubahan yang terjadi di daerah-daerah konflik. Selain sistem penyampaian, penetapan sasaran juga tidak didukung dengan data-data yang akurat sehingga sering terjadi salah sasaran.

#### **3.4.5 Lemahnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat**

Dalam hal penanganan konflik terlihat masih rendahnya kapasitas aparat pemerintahan dan aparat keamanan, terutama dalam hal pencegahan dan resolusi konflik. Dengan mempertimbangkan lebih mampunya pemerintah daerah di dalam melakukan identifikasi pola penanganan konflik yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi di tingkat masyarakat dibandingkan dengan yang ditetapkan secara "top-down" dari Pemerintah Pusat, serta secara faktual pemerintah daerah, khususnya di daerah-daerah yang pernah atau hingga kini masih dilanda konflik memiliki pengalaman dalam penanganan konflik maka Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dan kapasitas yang kompeten dalam memberikan masukan dan rekomendasi terhadap rencana aksi penanganan konflik secara lebih tepat sasaran dan berhasilguna.

#### **3.4.6 Kurang efektifnya Sistem Pengendalian (*Monitoring dan Evaluasi*)**

Program penanganan konflik yang dilakukan oleh instansi pusat terkait selama ini masih kurang memperhatikan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya, sehingga menyebabkan pencapaian sasaran program yang kurang berdayaguna dan berhasilguna. Monitoring dan evaluasi yang merupakan komponen penting dalam pelaksanaan suatu program/proyek, justru tidak banyak dibahas oleh instansi pusat terkait.

### **3.4.7. Tidak Tertanganinya Potensi-Potensi Konflik dan Semakin Meluasnya Potensi Konflik**

Potensi konflik yang ditangani selama ini bersifat sementara dan perlu dikembangkan secara preventif agar potensi-potensi konflik tidak semakin meluas. Fokus penanganan yang masih berorientasi pada penyelesaian konflik dan penanganan paska konflik selama ini dirasakan tidak cukup, karena masih banyak ditemui permasalahan baru akibat tidak diantisipasi berbagai potensi yang muncul dan berkembang.

### **3.4.8. Kurang mengenali akar permasalahan**

Penanganan konflik di Indonesia dinilai kurang mengenalinya akar permasalahan. Penanganan bersifat **inkremental** (tidak menyentuh akar permasalahan) tetapi menangani dampak/konsekuensi konflik (pengungsi, rehabilitasi sarana-prasarana). Program-program yang dilakukan hanya melalui program-program reguler.<sup>29</sup>

## **3.5. Mediasi Konflik Aceh**

### **3.5.1 Peran Hendry Dunant Centre (HDC) dalam Memfasilitasi Penyelesaian Konflik RI - GAM**

Perundingan antara RI-GAM yang berlangsung pada pertengahan tahun 2000 di Jenewa adalah berkat hasil usaha fasilitasi oleh HDC. HDC dipilih sebagai pihak ketiga karena sebagai organisasi kemanusiaan HDC tidak memiliki kepentingan politik tertentu. Pemerintah Indonesia meminta HDC untuk turut campur menyelesaikan masalah Aceh dengan membujuk GAM agar mau berunding. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang dimiliki HDC sebagai lembaga kemanusiaan yang memelopori dialog di daerah-daerah konflik untuk mengurangi penderitaan rakyat sipil.

Awal keterlibatan HDC pertama kali di Indonesia dimulai pada bulan Agustus 1999 ketika Presiden Abdurrahman Wahid meminta HDC untuk

<sup>29</sup> Mawardi, Dr.Ir.Moch.Ikhwanuddin, (2005), Strategi Dasar Penanganan Daerah Konflik di Indonesia, <http://pda-undp.tripod.com/plenary52.pdf>.

memfasilitasi dialog kemanusiaan guna menyelesaikan konflik Aceh. Ketika berpidato di HDC pada tanggal 30 Januari 2000, Abdurrahman Wahid menekankan pada peran dialog kemanusiaan dalam mengubah situasi konflik yang pada umumnya didasarkan pada ideologi. Sebelumnya, pada tanggal 27 Januari 2000, Duta Besar Indonesia untuk PBB di Geneva saat itu, Hassan Wirajuda, menemui Hasan Tiro untuk melakukan dialog. Sementara kedua Hasan melakukan dialog, Presiden Abdurrahman Wahid memerintahkan Pejabat Sekretaris Negara, Bondan Gunawan, untuk menemui pemimpin GAM yang berada di Aceh, Abdullah Syafei.

Permintaan ini kemudian ditanggapi mendapat tanggapan positif oleh HDC. Aksi pertama yang dilakukan HDC adalah membawa RI-GAM secara bersama-sama ke meja perundingan pada bulan Januari 2000 yang kemudian disusul dengan serangkaian dialog yang diakhiri kedua belah pihak. Meskipun tidak memiliki kepercayaan terhadap Pemerintah Indonesia, GAM segera menerima tawaran dialog dengan tujuan menginternasionalisasi kasus Aceh dan mendapat dukungan atau simpati dari Amerika atau negara-negara Eropa dengan harapan mereka mau menekan Indonesia agar melepaskan Aceh. GAM juga berharap dialog ini dapat mengekspos seluruh kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukan TNI terhadap warga Aceh.

Proses negosiasi sangat sulit karena juru bicara dari GAM berulang kali menyatakan bahwa tidak akan pernah terjadi penyelesaian kecuali kemerdekaan sedangkan Pemerintah Indonesia juga berkali-kali memberikan ultimatum bahwa negosiasi hendaknya dilakukan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. HDC percaya kendati keberadaan mereka sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara tuntas, fokus dialog yang diarahkan pada masalah kemanusiaan sebagai dampak terjadinya konflik pada akhirnya akan mampu membangun rasa saling percaya kedua belah pihak dan membawa mereka pada berbagai kemungkinan terbukanya jalan yang tak terduga dan menyiapkan resolusi permanen. Inisiatif HDC ini kemudian sangat didukung oleh PBB dan Uni Eropa.

Pada tanggal 27 Januari, setelah Hassan Wirajuda bertemu Hasan Tiro dan setelah Presiden Abdurrahman Wahid menemui HDC pada tanggal 30 Januari

2000, HDC mulai memfasilitasi berbagai dialog di Geneva pada tanggal 24 Maret dan 14-17 April 2000. Kongkritnya, pada 12 Mei 2000 ditandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh di Geneva, Swiss, oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Hassan Wirajuda, dan wakil GAM, Zaini Abdullah. Langkah ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau gerbang menuju penyelesaian konflik yang sebenarnya. Di tingkat lapangan, kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan organisasi untuk mendukung implementasi seperti pembentukan komite bersama untuk Aksi Kemanusiaan (KBAK). Bagi masyarakat internasional, kesepakatan tersebut dinilai sebuah langkah maju menuju perdamaian Aceh yang diwujudkan oleh berbagai pernyataan dan aliran bantuan dana internasional. Tetapi di dalam negeri, Pemerintah justru menuai kritik karena kesepakatan tersebut dianggap sebagai pengakuan resmi terhadap eksistensi GAM.

Berbagai dialog terjadi dari tahun 2000 sampai 2001. Puncak dari rangkaian dialog tersebut terjadi pada tanggal 8 dan 9 Desember 2002. GAM, yang dipimpin oleh Zaini Abdullah dan Hasan Tiro, dan Pemerintah Indonesia, yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, kembali bertemu untuk membicarakan Kesepakatan Penghentian Permusuhan atau Cessation of Hostility Agreement (CoHA). Kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal 9 Desember 2002 oleh Zaini Abdullah, sebagai wakil GAM, dan Wirjono Sastrohandoyo, wakil dari pihak Pemerintah Indonesia.

Namun, walaupun GAM dan pemerintah RI berhasil melahirkan berbagai kesepakatan penting, kedua belah pihak tersebut tidak pernah berhasil menemukan titik kompromi mengenai isu fundamental mengenai apakah Aceh tetap bagian integral dari NKRI atau menjadi merdeka. Para pemimpin Indonesia selalu mengedepankan menjaga integritas wilayah dan sebaliknya, mencegah disintegrasi. Sedangkan pemimpin GAM bersikukuh mengenai hak untuk memerdekakan diri.

Pada awal 2003, GAM menolak menyerahkan senjata-senjata mereka dan tentara Indonesia juga menolak untuk menarik pasukannya saat negosiasi di Jepang.

Rasa saling percaya yang tadinya telah terbangun melalui dialog interaktif kemudian mulai menyusut. Berbagai upaya dialog baik yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia maupun GAM banyak menemui kendala dan kegagalan. Semakin buruknya kondisi keamanan di Aceh dan tiadanya jaminan keselamatan terhadap anggota tim KKB dan HDC pada tanggal 15 Mei 2003 akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Aceh. Kendati demikian, berbagai upaya dialog tetap dilakukan oleh HDC untuk kembali menciptakan rasa saling percaya dan perdamaian di Aceh.

Namun kemudian ada status darurat militer di Aceh. Status darurat militer ini efektif diberlakukan per tanggal 19 Mei 2003 pada masa pemerintahan Presiden Megawati. Status ini dibikin sampai jangka waktu 6 bulan yang kemudian akan dievaluasi pelaksanaannya. Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto kemudian mengirim puluhan ribu pasukan Aceh atas nama “Operasi Pemulihan Keamanan” dengan tujuan “menghancurkan kekuatan GAM sampai ke akar-akarnya”.

Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, CoHA menjadi diabaikan dan peran HDC terhenti. Pada tahap inilah kemudian HDC telah gagal menjalankan perannya sebagai fasilitator perdamaian di Aceh.<sup>30</sup>

### **3.5.2 Mediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI)**

#### **a. Proses menuju Helsinki**

Dalam perkembangan kajian-kajian di masa transisi tentang Aceh, secara umum dapat dipetakan dalam beberapa perspektif pendekatan. Perspektif pertama melihat bahwa apa yang terjadi di Aceh adalah persoalan politik. Pendekatan konflik dan resolusi konflik kerap kali dominan sebagai instrumen analisis. Perspektif kedua memandang bahwa fenomena Aceh adalah fenomena konflik antara pusat dan daerah.

Membangun kepercayaan adalah suatu proses yang amat penting sebagai sebuah bagian dari komunikasi sosial dan politik dengan kelompok separatis.

---

<sup>30</sup> Zulkarnaen, Iskandar (2004). Peran Fasilitator International Dalam Penyelesaian Konflik Internal, Studi Kasus : Keterlibatan Hendry Dunant Centre (HDC) Dalam Perundingan RI-GAM

Melalui pendekatan ini, minimal dapat dipetakan tiga hal yang amat berguna dalam mengupayakan konsensus normatif dengan kelompok separatis, yaitu: pertama, melalui komunikasi sosial, atau komunikasi personal, dapat dipetakan tuntutan politik kelompok separatis, respon dan pemikiran kelompok separatis terhadap sejumlah langkah yang pernah ditempuh oleh Pemerintah RI, sikap politiknya, dan harapan-harapan kelompok separatis; kedua, adanya komunikasi personal antara pihak yang memberontak dengan Pemerintah RI sehingga masing-masing pihak saling memahami pemikiran dan solusi yang mungkin berguna di kemudian hari apabila akan terjadi perundingan; dan ketiga, adanya kepercayaan antara pihak-pihak yang saling berseteru.

Dengan tujuan membangun kepercayaan dengan pihak GAM ini, maka harus dipilih pihak ketiga yang dipercayai oleh kedua belah pihak.

#### **b. Crisis Management Initiative (CMI) sebagai mediator konflik Aceh**

CMI merupakan sebuah NGO internasional yang bergerak dalam bidang resolusi konflik yang berlokasi di pusat Kota Helsinki, Finlandia yang berdiri pada 2000. Tujuan lembaga ini adalah membantu masyarakat internasional untuk keluar dari krisis internasional mulai dari isu kemanusiaan sampai dengan soal keamanan dan pembangunan. Lahan kerjanya tidak hanya di Eropa, tetapi juga sampai ke Afrika.

Dipilihnya CMI (*Crisis Management Initiative*) oleh pihak RI, salah satu alasannya, karena Martti Ahtisaari memiliki kesepahaman dengan pihak RI, bahwa dalam menyelesaikan separatisme di Aceh, konsep yang memungkinkan digunakan untuk adalah konsep otonomi khusus.

#### **c. Proses Negosiasi Perjanjian Damai Helsinki**

Dengan terpilihnya mantan tentara yang mempunyai pandangan yang terbuka, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam pemilihan umum sebagai presiden pada tahun 2004, prospek untuk resolusi damai untuk konflik Aceh membaik. Baik Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah mendapatkan pengalaman berharga dan negosiasi penyelesaian konflik ketika berhadapan dengan masalah-masalah di Poso dan Maluku. Dalam waktu singkat setelah menjabat, Kalla

diminta untuk mendekati para pemimpin GAM mengenai perdamaian untuk mengakhiri konflik. Menyadari hal-hal yang potensial merusak baik di dalam parlemen dan angkatan bersenjata, Kalla mengirim Deputy Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Farid Husain untuk diam-diam berbicara dengan para pemimpin GAM baik di Aceh maupun di luar negeri.

Kenyataan dalam konteks bahwa tsunami Samudera India tanggal 26 Desember 2004 yang menghancurkan dan menyapu sebagian besar Aceh. Tsunami menewaskan lebih dari 150,000 orang mati Aceh atau tidak diketahui nasibnya, dan ribuan lainnya mengungsi. Kehancuran ini mendapat sorotan internasional dan mendorong upaya bantuan kemanusiaan besar-besaran. Tsunami juga merupakan pukulan yang cukup untuk kombatan di kedua belah pihak baik GAM maupun tentara Indonesia. Pada akhirnya hal itu menjadi katalis yang membawa kedua belah pihak ke meja untuk melakukan perjanjian perdamaian dan memfasilitasi proses pemulihan Aceh.

Dalam proses negosiasi perdamaian konflik Aceh, wakil pemerintah Republik Indonesia dan wakil dari Gerakan Aceh Merdeka bertemu untuk melakukan perundingan.

Pemerintah RI mengirim tiga menteri untuk berunding dengan GAM. Tim Indonesia dipimpin oleh ketua perunding Hamid Awaluddin, menteri untuk keadilan dan hak asasi manusia. Dia dibantu oleh Farid Husein, menteri komunikasi dan informasi, Sofyan Djalil, seorang asli Aceh dan deputy menteri kesejahteraan masyarakat, dan dua pejabat dari kementerian urusan luar negeri. Baik Presiden Yudhoyono ataupun Wakil Presiden Kalla tidak menghadiri perundingan, Kalla memberikan petunjuk dari Indonesia pada setiap langkah proses negosiasi. Presiden Yudhoyono tidak terlibat, tetapi dibutuhkan untuk mengambil keputusan penting, seperti dalam isu mengenai pembentukan partai politik Aceh.

Tim GAM terdiri dari anggota kepemimpinan yang diangkat di pengasingan, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Pemerintahan Negara Aceh Malik Mahmud. Dia disertai oleh menteri luar negeri GAM, Dr Zaini Abdullah, juru bicara Bakhtiar Abdullah, dan pejabat politik Nur Djuli dan Nurdin Abdul Rahman. Kemudian dalam putaran berikutnya mereka bergabung dengan para

pemimpin dari Aceh, termasuk Shadia Marhaban dan Irwandi Yusuf, yang kemudian dipilih sebagai gubernur Aceh; GAM didukung oleh Damien Kingsbury Australian akademik, yang memberi saran dalam dan merumuskan opsi-opsi untuk dinegosiasikan selama proses berlangsung. Sejumlah kecil intelektual Aceh juga mendampingi dari kejauhan. Terutama karena proses dilakukan begitu jauh dari Aceh, pengamat terbatas pada sejumlah Finlandia, diplomat Uni Eropa dan penasehat akademis.

Tempat perundingan dilaksanakan, kota Helsinki, Finlandia, di Königstedt Manor antara Januari and Agustus 2005, negosiasi ini membawa hasil ditandatanganinya *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Republik Indonesia. Perjanjian ini terdiri dari enam pokok bahasan berkenaan dengan Penyelenggaraan Pemerintah di Aceh Undang-undang tentang penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh, Partisipasi Politik, Ekonomi, Peraturan Perundang-undangan, Hak Asasi Manusia, Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat, Pengaturan Keamanan, Pembentukan Misi Monitoring Aceh, dan Penyelesaian perselisihan.

Isi MoU termasuk beberapa elemen penting yang berhubungan dengan keadilan. Bagian mengenai hak asasi manusia termasuk ketentuan untuk membentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi khususnya untuk Aceh; Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dihubungkan dengan rencana komisi kebenaran nasional Indonesia. Bagian amnesti dari MoU diadakan untuk pembebasan dan reintegrasi segera dari narapidana dan tahanan politik GAM. Bagian yang sama juga menyatakan bahwa semua rakyat sipil 'yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik' akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak.

Peran Mantan presiden Finlandia Martti Ahtisaari membawa perdamaian ke Aceh telah didokumentasikan dengan baik, dan ia menerima pengakuan internasional yang signifikan, terutama dengan dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian 2008.<sup>31</sup> Dia juga mempengaruhi pilihan tempat yang dekat dan nyaman untuk beberapa pemimpin GAM di pengasingan yang berbasis di negara

---

<sup>31</sup> Cunliffe, Scott, Eddie Riyadi, Raimondus Arwalembun, Hendrik Boli Tobi,(June 2009),*Negotiating Peace in Indonesia*, Initiative for Peace Building.

Swedia, Ahtisaari memediasi dalam kapasitasnya sebagai ketua LSM Konflik Finlandia berbasis Management Initiative (CMI), dengan pembicaraan putaran pertama didukung oleh CMI dan pemerintah Finlandia.

Setelah putaran pertama, ketika Ahtisaari merasakan bahwa hasil positif dicapai ia mendekati Uni Eropa, yang menyetujui untuk mendanai sisa pembicaraan. Uni Eropa juga memegang peranan kunci dalam melaksanakan MoU dengan membentuk Aceh Monitoring Mission (AMM) bekerjasama dengan Asosiasi Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dimasukkannya perwakilan ASEAN dalam AMM dianggap untuk menenangkan anggota pemerintahan Indonesia yang bersikeras AMM memiliki lebih banyak komponen lokal. Pengalaman Indonesia dengan PBB di Timor Leste membuat hampir tidak mungkin untuk memiliki keterlibatan langsung PBB dalam pembicaraan atau proses implementasi. Namun, satu negotiator Indonesia mengingatkan bahwa pemerintah juga takut bahwa kegagalan untuk mencapai kesepakatan akan menggerogoti bantuan internasional lanjutan sangat penting untuk upaya bantuan tsunami.

#### **d. Keberhasilan CMI dan Model Penyelesaian Konflik di Aceh**

Penyelesaian konflik yang disebabkan oleh sejumlah faktor yang multidimensi dan telah terbentuknya suatu kelompok kekuatan bersenjata, bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Namun pendekatan dialog yang dikenal dengan istilah Perundingan Helsinki mampu meredam dan menyelesaikannya secara bermartabat. Kedua belah pihak sesungguhnya berada dalam situasi *lose-lose solution*. Hal ini yang salah satunya dapat mencegah *deadlock* dan kedua belah pihak dapat menuntaskan sejumlah agenda yang perlu didialogkan. Faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan itu dan model penyelesaian seperti apakah yang menjadi basis bagi penyelesaian konflik Aceh.

Tercapainya perundingan antara RI-GAM dari putaran pertama hingga putaran kelima, dan diparafnya draft MoU Helsinki pada perundingan putaran kelima, adalah sebuah pencapaian yang amat penting dan mendasar bagi penyelesaian konflik Aceh. Meskipun demikian, bukan berarti dinamika perundingan berjalan mulus.

Perundingan pada putaran pertama dan kedua sangat kritis, khususnya pada putaran kedua, karena terjadi dead lock, tidak ada titik temu, karena posisi kedua belah pihak yang berbeda, peran CMI dalam mencari alternatif rumusan perundingan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam perundingan antara RI-GAM. Bagaimanapun, kepiawaian Martti dan para pendukungnya di CMI sangat berbeda dengan perundingan antara RI-GAM sebelum-sebelumnya.

Menurut Juha Christensen dalam diskusi sehari di Yogyakarta, 10 Maret 2007, alasan kenapa memilih Presiden Ahtisaari, karena setelah CoHA dan HDC, harus ada institusi dan organisasi yang lebih tinggi dari HDC dan harus ada orang yang menjadi mediator kehormatan di dunia daripada yang lebih dulu. Presiden Ahtisaari, mantan presiden sudah punya institusi sendiri, memiliki kantor, CMI, kemudian tingkatnya lebih tinggi dari organisasi yang lebih dulu. Juga Ahtisaari ada hubungan langsung dengan Kofi Anan (Sekjen PBB), beliau kenal baik sekali dengan pimpinan Uni Eropa.<sup>32</sup>

Martti bersedia menjadi perantara perundingan dengan syarat bahwa Pemerintah RI benar-benar ingin menyelesaikan persoalan separatisme GAM secara tuntas. Alasan lain, karena Martti sebagai juru runding adalah reputasi tokoh ini dalam persoalan kemanusiaan, sehingga dapat menjadi jembatan untuk menciptakan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dari desain perundingan, di Helsinki dapat mendorong penyelesaian konflik secara permanen, bukan *cease fire* atau gencatan senjata.

Perundingan sebelumnya	Perundingan Helsinki
Penghentian konflik secara gencatan senjata	Penghentian konflik secara permanen

<sup>32</sup> Nurhasim, Moch, (Juli 2008), *Konflik dan Integrasi Politik Gerakan Aceh Merdeka, Kajian Tentang Konsensus Normatif antara RI- GAM dalam Perundingan Helsinki*, PUSTAKA PELAJAR, Yogyakarta

Tabel 3.3.  
Perbandingan Prinsip Perundingan antara CoHA dan Helsinki<sup>33</sup>

<b>Prinsip</b>	<b>CoHA</b>	<b>Helsinki</b>
Satu meja perundingan	Kedua belah pihak tidak saling bertatap muka	Kedua belah pihak saling bertatap muka
Lokasi	Terlalu jauh dari kediaman delegasi GAM	Dapat dijangkau secara lebih mudah, sehingga GAM selalu dapat hadir
Bahasa	Tidak menggunakan bahasa Indonesia, karena negosiator tidak mengerti bahasa Indonesia	Menggunakan bahasa Melayu, karena negosiator ada yang mengerti bahasa Melayu
Kepercayaan terhadap negosiator	Kurang dipercaya oleh pihak RI, karena HDC dianggap lebih condong pada pihak GAM	Dipercaya oleh kedua belah pihak, karena penentuannya dikonsultasikan kepada keduanya
Agenda perundingan	Tidak menyinggung isu krusial khususnya tentang kemerdekaan	Semua isu krusial diperdebatkan oleh kedua belah pihak, termasuk isu kemerdekaan
Waktu	Tidak ada agenda yang disepakati bersama  Mediator lebih condong berfungsi sebagai pengantar proposal kedua belah pihak	Pertemuan menghasilkan agenda pembicaraan bersama untuk putaran selanjutnya  Mediator selalu memimpin dalam setiap pembicaraan, dan memiliki kewenangan

<sup>33</sup> ibid

	<p>Terlalu sempit dan terpisah sehingga lobi antar-juru runding tidak mungkin dilakukan</p>	<p>untuk mengajukan agenda yang perlu dibicarakan oleh kedua belah pihak.</p> <p>Waktu relatif longgar, karena makan siang hampir 2,5 jam sehingga memungkinkan ada lobi-lobi antar-juru runding</p>
Delegasi	<p>Kurang memiliki posisi yang kuat dalam struktur Pemerintahan RI, sehingga relatif sulit melakukan perundingan, karena kurang didukung oleh presiden. Artinya delegasi seakan-akan bukan wakil dari presiden dalam perundingan</p>	<p>Pemerintah RI dalam hal ini presiden dan wapres mengirimkan 2 menteri, 2 deputi, 1 menko sebagai supervisi dalam perundingan. Posisi perunding RI, mewakili Pemerintah RI (presiden dan wapres)</p>
Komitmen Elit	<p>Elit GAM di Swedia kurang mendukung perundingan model ini. Perundingan hanya sebagai gencatan senjata (cease fire) semata-mata.</p> <p>Komitmen presiden dan wakil presiden minim dalam menempuh jalan damai.</p>	<p>Kedua belah pihak berkomitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara permanen dan bermartabat.</p> <p>Komitmen presiden dan elit GAM sangat kuat untuk menyelesaikan Aceh secara damai.</p>

### **3.6. Efek sebelum dan sesudah konflik di Aceh**

#### **3.6.1 Efek dahulu (kerugian)**

Ongkos perang yang harus dikeluarkan oleh negara seperti bentuk anggaran persenjataan dan logistik tentara sangat besar. Nyawa manusia yang melayang, banyak perempuan Aceh jadi janda secara terpaksa. Anak-anak Aceh banyak yang jadi yatim di saat mereka masih amat belia. Terganggunya proses pendidikan karena aspek pendidikan yang hancur lebur lantaran sekolah-sekolah dibakar. Banyak infrastruktur yang rusak akibat dirusak oleh baik kelompok separatis ataupun pihak tentara.

Dari aspek sosiologis dan psikologis, anak-anak Aceh tumbuh dan berkembang dalam iklim yang serba awas. Suasana kekerasan dan tak saling percaya, ikut mengantar pertumbuhan mereka. Serta trauma psikologis khususnya pada anak-anak dan perempuan dan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari sisi perekonomian, ekonomi Aceh menjadi porak-poranda. Dengan perang yang berlangsung tiga dekade, ekonomi Aceh lumpuh. Tak ada produksi, misalnya gas membuat terganggunya kegiatan ekonomi di daerah-daerah yang memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah-daerah konflik.

Dampak konflik pada keamanan masyarakat dirasakan di seluruh propinsi. Hampir di setiap kabupaten, warga menyatakan bagaimana kehidupan mereka terpengaruh. Mereka takut pergi ke kebun dan ke pusat ekonomi desa karena takut bertemu GAM yang telah kembali ke kaki bukit. Bentuk konflik utama GAM – pemerintah RI yang terkait terus menjadi pertempuran antara aktor bersenjata dan penculikan yang hampir selalu melibatkan warga sipil. Pemerasan merajalela di seluruh provinsi terutama di jalan raya utama, dan hampir seluruhnya dilakukan oleh TNI dan polisi.

#### **3.6.2. Efek sekarang (keuntungan)**

Dengan adanya damai, maka produksi gas bisa kembali berjalan. Dengan demikian, ada perputaran ekonomi yang membuka peluang lapangan kerja. Lapangan kerja, berarti adanya peluang memperoleh pendapatan, baik pendapatan

individu maupun pendapatan korporasi. Jika korporasi dan individu memiliki pendapatan, maka pemerintah pasti punya peluang mendapat pendapatan, karena mereka adalah subyek pajak.

Perdamaian telah membuka Aceh menjadi tempat perputaran ekonomi. Dengan damai, stabilitas bisa diraih. Dengan stabilitas, investor domestik dan investor luar berlomba memacu ekonomi di sana. Damai adalah generator yang menggerakkan ekonomi.

### **3.7 Keuntungan bagi pihak yang bertikai**

#### **3.7.1 Keuntungan RI**

Melalui negosiasi, GAM telah memberikan senjata, yang dipakai memberontak, membunuh dan merusak. Di atas segalanya, GAM telah mengakui negara kesatuan dengan Konstitusi kita dan tidak lagi menuntut kemerdekaan.

Selama konflik, pemerintah mengalokasikan anggaran yang dipakai untuk operasi militer. Angka-angka tersebut tentu saja selalu harus disiapkan tiap tahun. Dengan adanya perdamaian, maka alokasi dana untuk melakukan operasi militer, bisa dipakai untuk perbaikan pendidikan atau melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang porak-poranda selama perang.

#### **3.7.2 . Keuntungan GAM**

Dapat terlibat dalam politik, khususnya di pemerintahan lokal Aceh. Mantan kombatan GAM yang biasa hidup di hutan-hutan, dalam kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dan menjalani hidup normal.

### **3.8. Urutan Waktu konflik di Aceh**

Ada pun urutan konflik di Aceh mulai dari masa Daud Beureuh, masa GAM, masa mediasi oleh Hendry Dunant Centre sampai dengan mediasi oleh Crisis Management Initiative atau (CMI) bisa digambarkan dalam tabel seperti berikut :

Tabel 3.4.

Pandangan GAM	Peristiwa/Kejadian	Pandangan pemerintah Indonesia
<p>Daud Beureuh memimpin Darul Islam/TII melawan pemerintah setelah pemerintah gagal memenuhi janjinya untuk menerapkan hukum syariah di Aceh. GAM sebagai pengganti gerakan TII.</p>	<p><b>December 1976</b> Deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) oleh Hasan Tiro di Pidie.</p>	<p>September 1962 menandai berakhirnya pertempuran masyarakat Aceh melawan Jakarta, disebabkan Daud Beureuh menyerah kepada pemerintah. Gerakan baru (GAM) dianggap sebagai suatu ancaman signifikan dibandingkan dengan DI/TII.</p>
<p>GAM mempersiapkan perjuangan panjang, termasuk kemungkinan kerusakan dan penyiksaan, untuk menyetakan kemerdekaan dari Indonesia</p>	<p><b>August 1989</b> Zona Operasi Militer diadakan untuk menghancurkan GAM</p>	<p>Dengan militer yang kuat dan legislatif dikendalikan oleh presiden. Ini merupakan keputusan yang tepat untuk melakukan perang demi melindungi negara kesatuan Indonesia.</p>
<p>Pemerintahan baru ke era reformasi, yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dipandang sebagai kesempatan yang baik bagi gerakan separatis untuk mengejar agenda</p>	<p><b>October 1998</b> Indonesia menarik pasukan setelah 10 tahun beroperasi di Zona Militer (DOM). Operasi ini menewaskan 12.000 warga sipil, dan kelompok hak asasi manusia mencatat saat itu</p>	<p>Setelah 10 tahun operasi militer, pasukan pemerintah dipastikan telah membasmi 150 anggota GAM yang dicari mulai dari awal kampanye. Situasi keamanan dibawah</p>

GAM yang belum selesai yaitu kemerdekaan dari Indonesia.	ada 120 jenis penyiksaan yang menyebabkan trauma yang panjang bagi masyarakat Aceh.	kendali pemerintah. Pemerintah local menjamin pemberontakan dalam kendali atas perintah pembasmian pemberontak.
Dengan penurunan jumlah pasukan Indonesia, waktunya tepat untuk menyerang aparat pemerintah dalam rangka untuk mendapatkan kontrol teritori dan memperoleh kemerdekaan dari Indonesia.	<b>Awal 1999</b> Kekuatan GAM meningkat, dan ideologi telah menyebar, jumlah anggota GAM tumbuh di seluruh Aceh, GAM mulai menunjukkan kekuatan, mengakibatkan peningkatan jumlah pembakaran, pertempuran, pembunuhan, penculikan, penyergapan, dan pemindahan orang di seluruh Aceh.	Tanggung jawab pemerintah Indonesia sangat penting untuk tetap menjaga wilayah Aceh dari gerakan pemberontak.
Perjuangan GAM berhasil dimanfaatkan kekuatan mahasiswa untuk mendukung perjuangan mereka. GAM menggunakan kesempatan ini untuk mendorong orang untuk menghadiri rapat umum dalam rangka untuk menanamkan ideologi	<b>November 1999</b> Mengumpulkan massa untuk kampanye referendum. 1,5 juta orang berkumpul di Banda Aceh untuk menuntut Aceh menentukan nasib sendiri sebagai reaksi terhadap respon pemerintah tentang kondisi Aceh.	Rally yang diadakan oleh GAM menjadi puncak kekecewaan pemerintah pusat terhadap gerakan separatis GAM.

kemerdekaan dan mendapatkan perhatian internasional.		
Jeda Kemanusiaan memberikan kesempatan baik untuk mengkonsolidasikan pasukan dan memperkuat benteng GAM.	<b>September 2000</b> Kekerasan sadis konflik di Aceh telah mendapatkan perhatian internasional. Jeda Kemanusiaan, yang ditandatangani oleh Pemerintah RI dan GAM, memungkinkan masyarakat internasional untuk mendistribusikan bantuan bagi korban konflik. Ini juga merupakan titik keberangkatan menuju gencatan senjata dan proses perdamaian.	Karena kritik nasional dan internasional terhadap militer, pemerintah memutuskan mengubah strategi dari ofensif ke defensif.
Keyakinan tinggi, prajurit yang kuat, mengikuti konsolidasi, dan sebagai akibat dari memiliki dukungan finansial masyarakat untuk membeli senjata. Hal ini merupakan puncak kekuatan dan popularitas GAM.	<b>Maret 2001</b> Ketegangan tinggi dan kekerasan di seluruh Aceh sebagai akibat serangan GAM terhadap militer.	Pemerintah menanggapi dengan meningkatkan jumlah pasukan untuk menyeimbangkan dan mengurangi kekuatan GAM.
Mengikuti keberhasilan perjuangan politik, langkah berikutnya	<b>Desember 2002</b> Perjanjian Penghentian Permusuhan (COHA) yang	COHA memberikan Otonomi Khusus bagi GAM/ Pemerintah

<p>adalah menafsirkan COHA untuk memungkinkan diadakan pemilu lokal menuju pintu gerbang kemerdekaan.</p>	<p>ditandatangani Pemerintah RI dan GAM difasilitasi oleh Hendry Dunant Centre. CoHA menjadi langkah pertama dalam resolusi damai atas konflik Aceh. Belajar dari kegagalan Jeda Kemanusiaan, CoHA menugaskan ke seluruh Aceh Tim Monitoring Tripartit untuk memantau persyaratan perjanjian.</p>	<p>menunggu GAM untuk mengakui integritas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>
<p>Manfaat gagalnya COHA meningkatkan perhatian terhadap maksud GAM</p>	<p><b>April 2003</b> Perjanjian Penghentian Permusuhan gagal. Tim monitoring ditarik kembali ke Banda Aceh.</p>	<p>Banyak poin dalam COHA dilanggar oleh GAM. Tim pemantau internasional tidak netral dalam memantau perjanjian. Pemerintah merasa tepat untuk menarik diri dari perjanjian tersebut.</p>
<p>GAM siap menghadapi konsekuensi dari perjuangan.</p>	<p><b>Mei 2003</b> 50.000 pasukan militer dikerahkan.</p>	<p>Menghancurkan semua elemen GAM dipandang sebagai solusi yang hanya sekali proses negosiasi telah gagal.</p>
<p>Perjuangan GAM memiliki keunggulan lokal, menggunakan pengetahuan tentang daerah untuk</p>	<p><b>Mei 2004</b> Darurat Sipil diberlakukan.</p>	<p>Lama operasi selama setahun tidak cukup untuk menghancurkan GAM.</p>

menghindari diri dari kekalahan melawan militer. Pemimpin GAM mencari solusi politik.		
Dengan jumlah pejuang GAM yang turun dan kekuatan GAM berkurang, menjadi waktu yang tepat untuk mencari solusi politik.	<b>Desember 2004</b> Gempa dan Tsunami melanda Aceh, menyebabkan 165.000 orang meninggal dan 30,000 orang hilang serta menyebabkan kerugian Rp4,5 triliun.	Pemerintah berupaya untuk menunjukkan komitmen terhadap pembangunan damai di Aceh.
GAM menuntut partai lokal diperbolehkan dalam pemilihan langsung lokal (solusi demokratis)	<b>Juni 2005</b> Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri konflik 30 tahun.	Lima putaran menghasilak kemauan GAM dan pengakuan kesatuan teritori Indonesia. Masalah dipecahkan secara komprehensif.
RI bersedia untuk menyelesaikan konflik dengan menawarkan pemerintahan-sendiri di dalam negara Indonesia.	<b>Agustus 2005</b> Pemerintah RI dan GAM menandatangani perjanjian damai untuk menciptakan solusi damai, komprehensif dan berkelanjutan untuk konflik di Aceh, dengan martabat untuk semua.	Resolusi konflik di Aceh menjadi kredit kepada pemerintah dengan lancarnya proses perdamaian. Pembangunan Nasional dapat dipercepat dan keamanan meningkat.